**Perubahan Kebijakan Pemerintah Bangladesh**

**Terhadap Kaum Rohingya**

**di Perbatasan Bangladesh-Myanmar**

**ABSTRAK**

Penelitian ini menelaah perubahan kebijakan Bangladesh terkait kaum Rohingya di perbatasan Bangladesh-Myanmar. Sejak Myanmar merdeka dan dipimpin oleh rezim junta militer, etnis Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Myanmar setelah dilaksanakannya Operasi Naga Min di tahun 1977. Tindakan represif pemerintah Myanmar memaksa kaum Rohingya untuk mencari perlindungan ke Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Arus migrasi terbesar menuju Bangladesh karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Myanmar. Tahun 1992, gelombang kedua arus migrasi paksa Rohingya sebanyak seperempat juta orang datang kembali ke Bangladesh. Setelah 4 dekade menerima aliran migrasi paksa kaum Rohingya, pemerintah Bangladesh menyatakan keengganannya untuk memberi perlindungan bagi kaum Rohingya. Sebab dari perubahan kebijakan Bangladesh yang semula menerima kemudian menolak menjadi pijakan utama permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut dianalisis menggunakan metode eksplanatif dengan teori sekuritisasi sebagai dasar argumen. Teori ini akan diperkuat dengan konsep persepsi ancaman, *humanitarianism*, keamanan manusia, dan keamanan nasional. Metamorfosis isu ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh. Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan, kemunculan gerakan anti-Rohingya, dan pecahnya konflik agama di Bangladesh berbuah pada pemulangan paksa serta penolakan akses masuk kaum Rohingya dan bantuan internasional. Berdasarkan temuan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa aliran migrasi paksa Rohingya dipandang oleh Bangladesh tidak hanya sekedar sebagai sebuah isu kemanusiaan, namun telah menjadi isu yang mengancam sektor ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh yang pada akhirnya dipandang sebagai sebuah bentuk ancaman keamanan nasional yang membutuhkan tindak sekuritisasi.

***Kata-kata kunci:*** *Keamanan, ancaman, sekuritisasi, Rohingya, Bangladesh*

Dewasa ini ancaman yang muncul terhadap keamanan internasional tidak lagi terpaku pada permasalahan senjata-senjata militer berat yang mematikan atau keamanan tradisional, namun telah berpindah pada permasalahan keamanan non-tradisional seperti ekonomi, lingkungan global, kemiskinan, penyakit seperti HIV/AIDS, kejahatan transnasional, hingga migrasi internasional. Lebih lanjut lagi, persoalan migrasi kerap dipandang bagai dua belah mata pedang karena menyangkut keamanan dan juga etika bagi negara penerima.

**Sejarah dan Perkembangan Kaum Rohingya di Bangladesh**

Isu mengenai migrasi internasional mulai muncul ke permukaan saat berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai dengan perpindahan manusia dalam jumlah besar ke luar lintas batas negara. Migrasi internasional terjadi tidak hanya berdasarkan motif ekonomi semata namun juga dapat disebabkan oleh hubungan negara dengan kelompok etnis yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pola, di antaranya adalah represi. Tindakan represi merupakan tindakan yang bersifat menekan dari pemerintah sedangkan tindakan akomodasi adalah pemberian beberapa otonomi dan representansi. Gurr menyebutkan bahwa konflik akan dapat ditekan ketika negara melakukan tindakan represi dan akomodasi sehingga dapat mengurangi ketakutan kelompok etnis akan dominasi pemerintah (Gurr 1993 dalam Biswas).

Rohingya merupakan salah satu kelompok etnis yang mendapatkan perlakuan diskriminasi dari negara asalnya, Myanmar. Pemerintahan junta militer Myanmar yang telah berkuasa sejak tahun 1962 memang dikenal sebagai rezim pemerintahan yang paling represif di dunia (Freedom House 2003). Melalui diskriminasi, tindak kekerasan, dan pengusiran oleh pemerintah Myanmar kepada Rohingya ditujukan sebagai bentuk pembersihan etnis Rohingya yang ada di Arakan, Myanmar. Tindak kekerasan atau penggunanaan aspek koersif melalui lembaga negara bukanlah sebuah hal baru yang menjadi cara bagi negara-negara tertentu untuk mengurangi segmen populasi mereka (Wardhani 2012, 3). Pengusiran pemerintah Myanmar terhadap Rohingya pada akhirnya memunculkan migrasi paksa. Karena tekanan-tekanan yang didapatkan, Rohingya mau tidak mau memilih untuk mencari perlindungan ke negara tetangga, terutama Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.

Kaum Rohingya yang bermigrasi ke Bangladesh pada umumnya merupakan korban kekerasan, okupasi militer dan pembersihan etnis yang berlangsung secara sistematis oleh pemerintah Myanmar (International Federation of Human Rights League 2000). Karena Bangladesh merupakan negara tetangga yang letaknya paling berdekatan dengan Myanmar, maka tidak mengherankan jika banyak kaum Rohingya yang mencari perlindungan ke Bangladesh. Selain itu faktor kesamaan etnis dan agama pun dirasa oleh Rohingya mampu memberi rasa aman bagi mereka. Semula Bangladesh menyambut baik kedatangan Rohingya dan pemerintah Bangladesh berharap untuk dapat mengatasi persoalan ini melalui diplomasi dengan pemerintah Myanmar.

Aliran migrasi paksa Rohingya ke Bangladesh terjadi di tahun 1978 ketika pemerintah junta militer Myanmar melakukan operasi Naga Min. Sekitar 200.000 orang melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Jumlah aliran migrasi paksa yang lebih besar, yakni sekitar 250.000 orang, terjadi di tahun 1992 saat pemerintah Myanmar tidak henti-hentinya melakukan tindak represi kepada Rohingya. Pemerintah Bangladesh menyediakan duapuluh kamp pengungsian di distrik Cox’s Bazar bagi orang-orang Rohingya yang datang (Kiragu 2011).

Berniat ingin menghindari tekanan dan kesulitan di negara asal, orang-orang Rohingya yang datang ke Bangladesh pun harus menghadapi berbagai kesulitan di negara tujuan. Secara umum, orang-orang yang bermigrasi paksa kerap menempati wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pembangunan rendah dengan kapasitas lokal yang terbatas, serta tingkat sosial ekonomi yang buruk (Wardhani 2012, 9). Permasalahan yang seringkali muncul di wilayah kamp pengungsian adalah buruknya sumber daya primer, seperti tempat tinggal, ketersediaan air, sanitasi, dan makanan. Menanggapi hal ini pemerintah Bangladesh kemudian membenahi kualitas tempat tinggal di tempat pengungsian pada tahun 2006 meskipun belum dapat dikatakan sebagai tempat tinggal yang layak huni (Wardhani 2012, 9).

Terbatasanya sumber daya yang dimiliki oleh Bangladesh tidak menghentikan laju migrasi orang-orang Rohingya untuk masuk ke Bangladesh. Selain dikarenakan faktor struktural yang tidak mendukung Rohingya untuk tetap berada di Myanmar, seperti tidak adanya akses terhadap kesempatan dan kebebasan dasar, faktor kesamaan etnis dan agama memberikan Rohingya rasa aman untuk menetap di Bangladesh. Di samping itu, peningkatan kualitas kamp-kamp pengungsian yang ada di Bangladesh mendorong Rohingya untuk datang dan menetap di Bangladesh (Bashar 2012).

Aliran migrasi paksa Rohingya yang tiba di Bangladesh tidak hanya menetap di kamp-kamp pengungsian resmi. Banyaknya jumlah orang Rohingya yang masuk ke wilayah Bangladesh tersebar pula ke dalam kamp-kamp pengungsian tidak resmi.



Grafik 2.1. Pertumbuhan Populasi Rohingya 2008-2010

(Sumber: Physicians for Human Rights 2010, 14)

Melalui grafik pertumbuhan populasi Rohingya dapat dilihat bahwa populasi Rohingya yang menetap di kamp pengungsian tidak resmi semakin meningkat. Wilayah Kutupalong yang paling banyak mengalami peningkatan dibandingkan dengan wilayah Leda. Sedangkan untuk pertumbuhan di kamp pengungsian resmi tidak begitu terlihat perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan Bangladesh tidak lagi mau memberikan status pengungsi pada orang Rohingya yang masuk ke perbatasan.

Berikut merupakan situasi kamp pengungsian di Kutupalong (tidak resmi) yang semakin memperburuk kondisi lingkungan Bangladesh:



Gambar 2.2. Kondisi Kamp Pengungsian di Kutupalong

(Sumber: Ellgee 2010)

Sumbu reaksi penolakan terhadap Rohingnya semakin menghangat di tahun 2009. Pada tahun 2009 terjadi kampanye anti-Rohingya di Bangladesh yang digerakkan oleh media dan elit politik. Wujud penolakan ini ditunjukkan melalui penangkapan dan pemenjaraan sekitar 500 orang Rohingya yang berada di luar wilayah Nayapara dan Kutupalong (Lewa 2010, 3), meskipun sebenarnya penangkapan ini bisa dilakukan oleh pihak otoritas Bangladesh kapan pun.

**Metamorfosis Isu Kemanusiaan menjadi Masalah Keamanan Manusia dan Keamanan Nasional Bangladesh**

Permasalahan migrasi paksa dan pengungsi tidak jarang menjadi penyebab konflik dan ketidakstabilan dari negara penerima/tujuan. Karenanya, migrasi paksa dan pengungsi kemudian dipandang memiliki arti penting dalam memahami perilaku masyarakat internasional (Wardhani 2012, 5). Persoalan migrasi bagaikan dua belah mata pedang karena menyangkut keamanan dan juga etika. Ketika negara mengedepankan etika di dalam menanggapi persoalan migrasi terkadang sisi keamanan negara penerima akan terganggu. Begitu pula sebaliknya, ketika negara melihat persoalan migrasi menjadi sebuah hal yang perlu untuk disekuritisasi, tindakan ini kemudian kerap memunculkan pertanyaan terhadap tanggung jawab moral dan juga etika yang dimiliki oleh negara penerima/tujuan.

Lane mengungkapkan bahwa di dalam perspektif normatif persoalan etika tidak akan muncul ketika ‘*irresistible forces meet immovable ideas’*. Yang dimaksudkan Lane disini adalah imigrasi merupakan *‘irresistible forces’* yang tidak akan menjadi persoalan ketika ‘*immovable ideas*’ (kedaulatan, demokrasi, dan nasionalitas) bukanlah sebuah persoalan bagi negara (Lane, n.d, 1). Seperti yang telah disebutkan bahwa arus migrasi terjadi bukan hanya didorong oleh motif ekonomi. Rohingya bermigrasi ke Bangladesh karena adanya pengusiran sebagai bentuk pembersihan etnis oleh pemerintah Myanmar terhadapnya.

Di samping karena letak yang berdekatan dan kesamaan etnis dan agama yang dimiliki, pemerintah Bangladesh juga merasa memiliki tanggung jawab moral sehingga bantuan-bantuan yang masuk melalui lembaga internasional pun diterima. Dengan harapan masalah ini dapat segera diselesaikan dan tidak berharap bertambahnya arus migrasi paksa Rohignya ke Bangladesh. Tetapi kemudian jumlah migrasi paksa yang terus menerus membanjiri perbatasan Bangladesh-Myanmar menyebabkan niat baik Bangladesh tidak berjalan sesuai harapan, hal ini juga mengakibatkan berkurangnya dukungan publik akan ‘kewajiban moral terhadap Rohingya’.

Terlebih negara dengan kapasitas terbatas seperti Bangladesh, merasa telah terbebani dengan kondisi miskin negaranya, Bangladesh kemudian merasa tidak lagi perlu menanggung kewajiban moral tersebut (Wardhani 2012, 6). Argumen tersebut didukung oleh pernyataan Lane (n.d) bahwa “...it is immigrants whose entry is typically restricted or barred, because jobs and welfare are now widely (if sometimes wrongly) assumed to be scarce and zero-sum goods.” Indikator Penolakan Bangladesh terhadap Rohingya ditunjukkan dengan beberapa peristiwa:

1. Kampanye dan pembentukan gerakan Anti-Rohingya Commitees

Sejak aliran migrasi paksa kedua, Bangladesh meminta lembaga internasional, UNHCR, untuk mendaftarkan sekitar 28.000 orang Rohingya sebagai pengungsi. Namun jumlah populasi orang Rohingya meningkat pesat setelah kedatangan di tahun 1992. Kebanyakan dari orang-orang Rohingya yang tidak terdaftar sebagai pengungsi menetap di kamp pengungsian sementara. Dalam perkembangannya, kamp sementara menjadi wilayah pemukiman kumuh yang merusak lingkungan dan mengusik masyarakat lokal (Ellgee 2010). Seiring berjalannya waktu, migrasi internasional dipandang sebagai masalah kemanusiaan yang kini menjadi masalah keamanan manusia. Ketidakpastian akan keberadaan Rohingya di Bangladesh akhirnya memicu sentimen *xenophobic* dari masyarakat Bangladesh yang diwujudkan dengan kampanye dan pembentukan gerakan yang dinamai Anti-Rohingya Committees.

Aksi sentimen masyarakat lokal ini diwujudkan pula melalui perlawanan fisik dari masyarakat kepada orang-orang Rohingya, khususnya yang berada di kamp-kamp sementara. Banyaknya jumlah orang Rohingya yang menetap di Bangladesh menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal. Salah satu orang Rohingya yang diwawancarai pun menyatakan bahwa, “They [masyarakat lokal Bangladesh] told me I should not be here, that we were taking all the local jobs…” (Ellgee 2010).

Rohingya dianggap menimbulkan banyak permasalahan di wilayah Cox’s Bazar dan menjadi beban bagi Bangladesh. Masyarakat tidak menginginkan Rohingya untuk menetap lebih lama lagi dan meminta repatriasi segera. Gerakan anti-Rohingya juga menyatakan keinginannya untuk menghentikan laju migrasi paksa Rohignya menuju Bangladesh melalui kerjasama dengan masyarakat lokal di wilayah perbatasan (Anonim 2010). Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masyarakat lokal Bangladesh merasa terusik dengan kehadiran orang-orang Rohingya. Keberadaan orang-orang Rohingya dianggap semakin memperparah kondisi kehidupan masyarakat lokal Bangladesh dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu pekerjaan. Gerakan Anti-Rohingya Committees dibentuk serta dibiayai oleh elit politik lokal Bangladesh dengan menyebarkan rasa benci dan penolakan terhadap kehadiran Rohingya dan secara aktif menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan terkait kedatangan orang-orang Rohingya di Bangladesh. Lebih jauh lagi, gerakan ini menginginkan pemerintah untuk segera melakukan repatriasi terhadap orang-orang Rohingya (Ellgee 2010).

1. Memperketat patroli perbatasan

Kaum Rohingya yang merupakan korban dari diskriminasi rezim pemerintahan Myanmar terdorong untuk mencari perlindungan ke Bangladesh karena letaknya yang berdekatan dan kemiripan etnis yang dimiliki. Namun keinginan orang-orang Rohingya untuk mendapatkan perlindungan di Bangladesh terhambat dengan tertutupnya wilayah perbatasan Bangladesh-Myanmar. Mulai tahun 2010, pemerintah Bangladesh secara aktif mengimplementasikan kebijakan *‘pushback’* dengan menggunakan Bangladesh Border Guards untuk menutup perbatasan secara ketat (Anonim 2012). Sebenarnya sejak setelah aliran kedua migrasi paksa Rohingya ke Bangladesh, tanda-tanda penolakan di perbatasan telah diperlihatkan oleh pemerintah Bangladesh. Pemerintah Bangladesh melalui pasukan keamanan Bangladesh memaksa orang-orang Rohingya untuk kembali ke Myanmar (Human Right Watch 2009, 3).

Terkait dengan tanggung jawab moral yang dipertanyakan, melalui wawancara yang dilakukan oleh kantor berita Al-Jazeera pada 28 Juli 2012, Hasina menyatakan bahwa,

“Bangladesh is already an overpopulated country…Why we should allow [the refugees] to enter our country? We provided them all they want, all they needed. This is not our [Bangladesh] responsibility, it is their [Myanmar Government] responsibility.” (Al-Jazeera 2012)

Keamanan nasional merupakan petimbangan utama yang mendasari penolakan Rohingya di wilayah Bangladesh. Sehingga negara tidak lagi merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menerima kehadiran Rohingya lebih banyak lagi di perbatasan. Senada dengan pernyataan Sheikh Hasina, Dipu Moni, Menteri Luar Negeri Bangladesh menyatakan bahwa, “Considering our national security interest, Bangladesh will not allow any Myanmar refugees in its territory” (Chowdury 2012). Muni melanjutkan,

“In no situation we can take any extra load of Rohingya refugees which could worsen our problems here… When one country persistently objects to such an issue, the international customary law cannot be applicable to it.” (Rahman 2012)

Persoalan migrasi paksa dan pengungsi semula merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan tanggung jawab moral dari negara penerima sebagai warga dunia. Kehadiran pengungsi, yang khususnya bermigrasi paksa, yang merupakan korban dari ketidakadilan politik maupun diskriminasi yang terjadi di negara asalnya dipandang sebagai subjek kekerasan dan eksploitasi dan berada dalam ketakutan (Loescher & Milner 2008). Meskipun Bangladesh bukan merupakan negara penandatangan Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protocol 167, Bangladesh pada masa-masa awal kedatangan Rohingya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membantu dengan menyediakan beberapa kebutuhan dasar dan kamp-kamp pengungsian sebagai tempat tinggal mereka. Bangladesh sendiri merupakan negara miskin[[1]](#footnote-1) dengan GDP yang rendah, banyaknya jumlah Rohingya yang menetap di perbatasan dirasa memberatkan perekonomian Bangladesh.

Jonathan Khrisner menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab sebagai garda depan yang berhak mengatur perbatasan dan melindungi hak-hak penduduknya, terutama sebagai komunitas politik di wilayahnya. Migrasi internasional dipandang sebagai sebuah tantangan bagi negara. Di dalam menyikapi hal ini, kemampuan negara dalam menerima para migran tidak dapat disamaratakan. Negara yang memiliki kapasitas/kemampuan institusional yang baik dianggap akan lebih mampu beradaptasi dengan fenomena migrasi dibandingkan dengan negara lemah atau negara gagal (Adamson dalam Kirshner 2006, 47).

Terdapat indikasi bahwa Bangladesh merupakan negara lemah, mengingat kondisi perekonomian Bangladesh yang tergolong buruk[[2]](#footnote-2), sehingga di dalam menangani aliran migrasi paksa kaum Rohingya, Bangladesh tidak mampu memenuhi tanggung jawab moralnya secara utuh. Hal ini merupakan salah satu indikasi terdapat gangguan perekonomian di Bangladesh yang pada akhirnya menyebabkan Bangladesh tidak mampu menerima orang-orang Rohingya secara terus menerus di wilayah perbatasan Bangladesh-Myanmar.

1. Menghentikan pasokan bantuan internasional

Selain itu sikap keras Bangladesh juga ditunjukkan melalui penolakan masuknya bantuan-bantuan dari lembaga internasional seperti FAO, Doctors Without Borders, Action Against Hunger, dan Muslim Aid karena dikhawatirkan dengan adanya bantuan akan semakin memicu arus migrasi yang lebih banyak lagi. Pemerintah Bangladesh merasa mereka tidak mampu lagi untuk menanggung lebih banyak orang Rohingya di wilayahnya. Selain memicu kedatangan orang-orang Rohingya, keberadaan bantuan internasional di Bangladesh kerap mengkritisi pemerintah Bangladesh kepada media internasional sehingga memperburuk citra Bangladesh di mata dunia (Anonim 2012).

*The Arakan Project* (2010) menyatakan bahwa Bangladesh telah mentoleransi keberadaan Rohingya di wilayah teritorinya, namun kemunculan gerakan anti-Rohingya yang terus berkembang di tengah populasi masyarakat lokal dengan sokongan elit politik dan media berimplikasi pada penolakan-penolakan yang terwujud melalui penolakan bantuan internasioal. Bangladesh meyakini bahwa keberadaan kaum Rohingya adalah penyebab dari segala peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Di samping itu, Rohingya juga dianggap mempengaruhi politik internal, ekonomi, dan juga kerusakan lingkungan di Bangladesh (Haque, 2). Serupa dengan laporan yang dipublikasikan oleh Danish Immigration Service (2011) bahwa pemerintah Bangladesh menaruh kekhawatiran terhadap faktor penarik *(pull-factor)* yang mampu memicu kedatangan Rohingya di perbatasan (Danish Immigration Service 2011, 15). Untuk itu, pemerintah Bangladesh tidak ingin menyediakan bantuan dan aktivitas pembangunan yang ditargetkan bagi kaum Rohingya.

**Kemiskinan dan Persaingan Masyarakat Lokal dengan Rohingya**

Meskipun dibatasi pergerakannya dan tidak memiliki ijin untuk bekerja, namun diketahui banyak dari orang-orang Rohingya yang tetap mencari pekerjaan di luar area kamp pengungsian. Tingkat pekerjaan yang rendah di wilayah Cox’s Bazar tidak menyurutkan keinginan orang-orang Rohingya untuk bekerja meskipun dengan upah yang rendah. Menurut Jannat, anggota the British Commission, orang-orang Rohignya merasa lebih mudah untuk mencari pekerjaan di Bangladesh dibandingkan di Myannmar (Danish Immigration Service 2011, 13). Tercatat bahwa upah yang diterima oleh para pekerja Rohingya adalah sebesar 180-250 Taka per hari. Jumlah ini merupakan sebagian dari upah yang diterima oleh pekerja lokal Bangladesh, yakni sebesar 300 Taka per hari.[[3]](#footnote-3) Bagi para pemilik perusahaan, keberadaan orang-orang Rohingya menguntungkan karena mampu meminimalisasi biaya produksi. Hal ini memunculkan persaingan antara masyarakat lokal dengan orang-orang Rohingya dalam mendapatkan pekerjaan.

Selain menyebabkan persaingan pekerjaan, dengan semakin bertambahnya jumlah orang Rohingya yang masuk ke wilayah Cox’s Bazar, sumber daya semakin langka dan kumuhnya wilayah kamp pengungsian menyebabkan kondisi di wilayah perbatasan beresiko mengancam kesehatan masyarakat (Médecins Sans Frontières 2002). Danish Immigration Service melaporkan bahwa orang-orang Rohingya menghadapi kesulitan ekonomi untuk bertahan hidup. Terlebih, sentimen terhadap Rohingya semakin terasa dikarenakan masyarakat lokal menganggap mereka sebagai pesaing di dalam mencari lahan pekerjaan.

Selain itu, sedikitnya persediaan sumber daya untuk dibagi, baik untuk masyarakat lokal dan orang-orang Rohingya berdampak pada ketidakcukupan *(self-sufficiency)* pemenuhan kebutuhan dasar bagi masing-masing pihak. Terlebih tekanan komunitas internasional kepada Bangladesh untuk menyediakan sumber daya dan pelayanan berdampak negatif pada perilaku masyarakat dan pemerintah lokal (World Food Program 2010). Pihak World Food Program (WFP) yang menemui pihak administrator Bangladesh yang berada di wilayah Ukhia dan Teknaf menjelaskan bahwa,

“The needs of the local communities were highlighted with a clear acknowledgement that targeted assistance could alleviate the levels of poverty and enhance access to basic services for the host communities and by implication, the unregistered Rohingya as well.” (World Food Program 2010)

Keberadaan para imigran dipandang sebagai sebuah bentuk ancaman bagi kedaulatan internal sebuah negara, terlebih bagi negara lemah karena dalam hal ini kedaulatan negara diuji. Tidak jarang, aliran migrasi yang datang dalam jumlah besar selama bertahun-tahun mampu berkontribusi untuk semakin memperlemah kondisi negara penerima (Hammerstad 2008, 5). Keberadaan Rohingya di Bangladesh semakin memperburuk kondisi perekonomian dan lingkungan yang berdampak pada sentimen pemerintah yang diwujudkan melalui pengusiran paksa terhadap Rohingya di perbatasan.

Maka dapat dikatakan bahwa jika masyarakat lokal dimudahkan dalam memperoleh kebutuhan dasarnya, hal ini akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Tentu saja ketika hal ini terjadi, tidak mungkin terjadi kekerasan terhadap orang Rohingya yang dianggap sebagai pesaing bagi masyarakat lokal Bangladesh. Sangat jelas bahwa keberadaan orang Rohingya memberikan dampak pada ketidakstabilan dan sosial di Bangladesh, hal ini didukung dengan pernyataan bahwa,

“This continuous intrusion of Rohingyas has an alarming impact on socio-economic equilibrium of Cox's Bazar, but this fact is overlooked due to the longstanding issue of oppression on Rohingyas.” (Manik 2012)

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa masalah tersebut tidak lagi dipandang sebagai permasalahan kemanusiaan semata, namun menjadi persoalan keamanan manusia bagi Bangladesh. Ancaman keamanan semacam ini merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi sehingga krisis pekerjaan, pangan, maupun krisis rasa aman kemudian mampu dipandang menjadi keamanan nasional. Permasalahan yang muncul akibat migrasi kemudian memunculkan sebuah tindakan sekuritisasi (Buzan & Wæver 2003) . Sekuritisasi melihat migran sebagai sebuah bentuk ancaman yang harus dihilangkan karena kehadirannya dipandang sebagai pihak luar yang memiliki potensi untuk menganggu stabilitas negara.

**Stabilitas Politik dan Kedaulatan Bangladesh terhadap Perbatasan**

Sikap keras Bangladesh yang tidak lagi mau menerima kehadiran Rohingya selain karena banyaknya jumlah Rohingya yang masuk ke perbatasan, selama kurang lebih 4 dekade Bangladesh telah menerima dan mengusahakan upaya terbaiknya untuk melakukan repatriasi namun Myanmar tidak menyambut hal ini dengan tangan terbuka. Sampai saat ini Myanmar masih tidak mau mengakui Rohingya sebagai penduduk asli Myanmar (Habib 2012). Penolakan Bangladesh akan keberadaan Rohingya salah satunya juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan adanya kaitan antara Rohingya dengan gerakan teroris. PM Bangladesh, Hasina, menyatakan kerisauannya terhadap aktivitas Jama’at Al-Islami yang memiliki basis kekuatan di perbatasan Myanmar berpotensi memiliki keterkaitan dengan beberapa insiden yang terjadi di Myanmar Juni 2012 (Anonim 2012).

Selain itu Bangladesh berargumen bahwa situasi kaum Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh dapat dibandingkan dengan pengungsi Afghanistan yang lama menetap di Pakistan di tahun 1980-an. Kamp pengungsian yang disediakan ditakutkan akan dipergunakan sebagai wadah kemunculan kelompok-kelompok fundamentalis dan pusat perekrutan kelompok militant (Haque, 3), seperti Harkat-ul Jihad-al Islami Bangladesh (HiJu-B). Dilaporkan bahwa sumber perekrutan anggota dari kelompok ini meliputi masyarakat lokal dan kaum Rohingya. Rohingya dilaporkan merupakan sumber yang signifikan bagi kelompok ini (Anonim 2012).

Terlebih konflik antar kaum Budha dan Muslim Myanmar yang terjadi pada bulan Juni turut mempengaruhi tensi antarkomunal di Bangladesh karena arus migrasi paksa jauh lebih besar dibandingkan biasanya. Terlebih kericuhan yang terjadi di Cox’s Bazar pada akhir September 2012 semakin menambah sentimen pemerintah terhadap keberadaan Rohingya. Rohingya diduga sebagai penyebab dari kekerasan berbasis religius yang terjadi di Bangladesh (Weng 2012).

Kaitan antara konflik dan adanya jumlah pengungsi yang besar di sebuah negara dijelaskan oleh Salehyan dan Gleditsch bahwa aliran pengungsi sesungguhnya berperan dalam penyebaran konflik lintas batas. Terdapat empat kemungkinan akibat yang akan disebabkan oleh aliran pengungsi di negara penerima: (1) pengungsi mampu membawa pemberontakan yang tersamar, senjata, dan ideologi konflik dari negara asal ke negara penerima. Hal ini disebut Salehyan dan Gleditsch sebagai “ex-porting conflict to new locations”; (2) pengungsi mampu menyediakan dukungan kepada kelompok di negara penerima yang memiliki keterkaitan dengan mereka (pengungsi). Contohnya: kekerabatan etnis atau latar belakang ideologi akan mampu memperkuat gerakan lokal untuk menentang rezim yang ada di negaranya; (3) pengungsi mampu mengubah *ethnic power balance* dan menciptakan tensi; (4) pengungsi mampu memberikan beban ekonomi yang berat bagi negara penerima dan dianggap sebagai sebuah hal yang negatif. Di samping itu, Salehyan dan Gleyditch menemukan fakta bahwa ketika negara yang menerima pengungsi dari negara tetangga memiliki kemungkinan besar untuk mengalami konflik (Forsberg 2009, 6).

Dalam menghadapi Rohingya, Bangladeshu melakukan upaya melalui pengurangan *(crackdown)* orang Rohingya di kamp pengungsian yang tidak resmi. Lebih jauh lagi penambahan pasukan keamanan di area perbatasan ditunjukkan oleh Bangladesh untuk mencegah lebih banyak aliran migrasi yang masuk ke perbatasan. Border Guard Bangladesh (BGB) merespon kedatangan orang Rohingya dengan meningkatkan patroli secara radikal di perbatasan dan menyerahkannya pada pasukan perbatasan Myanmar (Juberee 2012).

Persepsi ancaman yang ditimbulkan oleh keberadaan Rohingya membuat pemerintah bertindak melakukan sekuritisasi migrasi. Melalui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para elit politik, kaum Rohingya yang berada di Bangladesh merupakan sebuah bentuk ancaman bagi keberlangsungan ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh. Keberedaan kaum Rohingya yang lama menetap di Bangladesh membawa *existensial threat* seperti pengangguran yang semakin meningkat, konflik sosial di wilayah Bangladesh, dan ketakutan akan adanya gerakan teroris yang mampu mengganggu keamanan nasional Bangladesh.

Tindakan sekuritisasi pemerintah merupakan sebuah pembuktian terhadap kedaulatan yang dimiliki Bangladesh dalam melindungi penduduknya. Desakan yang muncul dari masyarakat lokal Bangladesh ditanggapi pemerintah dengan melakukan penolakan keras terhadap kaum Rohingya. Hal ini merupakan sebuah bentuk upaya dalam menjaga kestabilan politik Bangladesh sebagai sebuah negara yang berdaulat.

**Kesimpulan**

Penolakan Bangladesh terhadap kaum Rohingya di perbatasan merupakan akibat dari perubahan persepsi Bangladesh dalam memandang isu migrasi internasional. Semula kehadiran Rohingya dipandang sebagai sebuah isu kemanusiaan dimana Rohingya merupakan korban dari kebijakan pemerintah Myanmar. Migrasi paksa yang dihasilkan dari tindakan Myanmar dipandang Bangladesh pada awalnya sebagai sebuah persoalan yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Namun dalam perkembangannya, aliran migrasi paksa kaum Rohingya tiada henti memasuki wilayah perabatasan Bangladesh. Perubahan persepsi ini berkaitan erat dengan adanya hubungan migrasi internasional dengan keamanan nasional negara.

Perubahan persepsi Bangladesh dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang diakibatkan oleh kehadiran kaum Rohingya dan menjadikan isu migrasi internasional mampu bertransformasi menjadi isu keamanan manusia dan keamanan nasional. Perekonomian Bangladesh yang buruk, kelangkaan sumber daya, dan tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah Cox’s Bazar dengan bertambahnya kehadiran orang-orang Rohingya semakin meningkatkan persaingan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Persaingan ini kerap diwujudkan melalui tindak kekerasan dari masyarakat lokal kepada kaum Rohingya.

Terlebih ketika konflik Arakan yang terjadi pada Juni 2012, aliran migrasi paksa yang datang dari Myanmar ke Bangladesh semakin sering berdatangan. Arus migrasi mampu membawa konflik ke dalam negara penerima. Hal ini terbukti dengan adanya konflik berbasis agama yang terjadi di Bangladesh pada September 2012. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial oleh Rohingya pada akhirnya mengancam keamanan manusia masyarakat Bangladesh.

Dengan keberadaan Rohingya yang lama menetap dan menimbulkan situasi tidak kondusif bagi stabilitas keamanan Bangladesh, maka persepsi Bangladesh bermetamorfosis seiring berjalannya waktu. Rohingya yang semula dipandang sebagai sebuah masalah kemanusiaan, kemudian menjadi sumber dari penyebab ancaman keamanan manusia bagi masyarakat Bangladesh yang terimplikasi pada pecahnya konflik agama. Hal ini kemudian tidak lagi dipandang oleh Bangladesh hanya merupakan masalah keamanan manusia biasa, tetapi menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Ancaman yang menyentuh sektor ekonomi, sosial, dan politik Bangladesh menjadi motif utama penolakan keras dan pengetatan akses masuk Rohingya dan bantuan internasional di tahun 2010-2012.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Buzan, B. dan O. Wæver, 2003. *Regions and Powers. The Structure of International Security.* Cambridge: Cambridge University Press.

Kirshner, Jonathan, 2006. *Globalization and National Security*. New York: Routledge.

**Jurnal & Working Paper**

Forsberg, Erika, 2009. *Refugees and Intrastate Armed Conflict: A Contagion Process Approach*. Department of Peace and Conflict Research: Uppsala University.Hammerstad, Anne, 2008. *Securitisation as a self-fulfilling prophecy: Refugee movements and the North-South security divide.*

Haque, Mahbubul. *Undocumented Rohingya Refugees in Bangladesh: Government Justification of the Policies on their Basic Rights and Human Security* dalam http://www.humanrights-mu.org/attachments/article/88/1c%20Mahbubul.pdf

Lewa, Chris, 2010. *Unregistered Rohingya refugees in Bangladesh: Crackdown, forced displacement and hunger*. Bangkok: the Arakan Project.

Wardhani, Baiq, 2012. “*No Place Called Home*: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar”, *Jurnal Global dan Strategi: Edisi Khusus* (segera terbit).

**Artikel Online**

Anonim, 2010. *Anti Rohingya rally in Ukhiya, Cox’s Bazaar district* dalam http://www.kaladanpress.org/index.php/news/115-news-2010/january-2010/2368-anti-rohingya-rally-in-ukhiya-coxs-bazaar-district (diakses tanggal 29 Desember 2012)

Anonim, 2012. *Bangladesh: Assist, Protect Rohingya Refugees*: *Humanitarian Aid desperately needed; Crisis Situation in Burma Continues* dalam http://www.hrw.org/news/2012/08/22/bangladesh-assist-protect-rohingya-refugees (diakses tanggal 16 Desember 2012)

Anonim. *Harkat-ul-Jihad-al Islami: Terrorist Group, Bangladesh* dalam http://www.satp.org/satporgtp/countries/bangladesh/terroristoutfits/Huj.htm (diakses tanggal 7 Januari 2013)

Anonim, 2012. *PM Says Cannot Help Rohingya* dalam http://www.aljazeera.com/news/asia/2012/07/2012727185236711203.html (diakses tanggal 5 November 2012)

Anonim, 2012. “Rohingyas trying to enter B'desh might have terror links: PM”. *The Financial Express July 30, 2012* dalam http://www.thefinancialexpress-bd.com/more.php?news\_id=138403&date=2012-07-30 (diakses pada tanggal 31 Desember 2012)

Bashar, Iftekharul, 2012. “Rohingyas: two countries need to find a sustainable solution” dalam http://www.nationmultimedia.com/opinion/Rohingyas-two-countries-need-to-find-a-sustainable-30185411.html (diakses tanggal 12 Desember 2012)

Biswas, Bidisha. *Managing Discontent: Institutions, Intervention, and Ethnic Conflict*, dalam http://citation.allacademic.com/meta/p\_mla\_apa\_research\_citation/0/7/4/1/5/pages74154/p74154-14.php (diakses tanggal 1 Desember 2012)

Chowdury, Syed Tashfin, 2012. ***“Fleeing Rohingyas Driven from Safety”* dalam** http://www.atimes.com/atimes/Southeast\_Asia/NF16Ae02.html (**diakses tanggal 9 Desember 2012)**

Ellgee, Alex, 2010. “The Unwelcoming Committee” dalam *The Irrawaddy*, September 2010 Vol.18/No.9 dalam http://www2.irrawaddy.org/print\_article.php?art\_id=19397 (diakses tanggal 21 Desember 2012)

Habib, Haroon, 2012. “Not welcome anymore”. *The Hindu August 16, 2012* dalam http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/not-welcome-anymore/article3776247.ece (diakses tanggal 31 desember 2012)

Human Right Watch, 2009. *Perilous Plight* dalam http://www.hrw.org/node/83381/section/3 (diakses tanggal 31 Desember 2012)

Juberee, Abdullah, 2012. “Intruders change tactics to sneak into Bangladesh.”. New Age, June 22, 2012.

Loescher, Gil dan James Milner, 2008. “Forced Migration”. *Review: No.33* dalam http://www.prsproject.org/protracted-refugee-situations/ (diakses pada tanggal 10 Desember 2012)

Manik, Julfikar Ali, 2012. “The Rohigya issue”. *The Daily Star*, Thursday, August 9, 2012 dalam http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=245363 (diakses tanggal 24 Desember 2012)

Melissa Lane t.t. “Philosophical Perspectives on States and Immigration”. Cambridge: King’s College dalam www.histecon.magd.cam.ac.uk/docs/lane\_migration.pdf (diakses tanggal 11 Desember 2012)

Rahman, Shaikh Azizur, 2012. *“Bangladesh Keeps Door Firmly Shut on Rohingya”* dalam http://bdinn.com/articles/bangladesh-keeps-door-firmly-shut-on-rohingya (diakses tanggal 9 Desember 2012)

Weng, Lawi, 2012. *Rohingya Accused of Sparking Bangladesh Riots* dalam http://www.irrawaddy.org/archives/15336 (diakses tanggal 31 Desember 2012)

**Laporan**

Danish Immigration Service. 2011. *Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand: Fact finding mission to Bangladesh and Thailand.*

Freedom House, 2003. *The World’s Most Repressive Regimes,* Geneva: A Special Report to the 59th Session of the United Nations Commission on Human Rights.

International Federation of Human Rights League, 2000. “Burma: Repression, Discrimination and Ethnic Cleansing in Arakan”. *Report, International Mission of Inquiry*, No. 290/2, April 2000.

Kiragu, Esther*,* 2011. *States of Denial: A Review of UNHCR’s Response to the Protracted Situation of Stateless Rohingya Refugees in Bangladesh*. Geneva: Policy Development and Evaluation Service United Nations High Commissioner for Refugees.

Médecins Sans Frontières-Holland. 2002. *10 Years for the Rohingya Refugees in Bangladesh: Past, Present and Future.*

Physicians for Human Rights, 2010. *An Emergency Report:* *Stateless and Starving Persecuted Rohingya Flee Burma and Starved in Bangladesh* dalam http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/5C48E7C7725E5409C12576E100475265-Full\_Report.pdf (diakses tanggal 29 Desember 2012)

World Food Program. 2010. *Report of the WFP-UNHCR Joint Assessment Mission,* Bangladesh 30th May – 14th June 2010.

1. Bangladesh tercatat berada di peringkat 30 dalam daftar negara termiskin di dunia dengan GDP per kapita sebesar $1700 [http://www.aneki.com/], sedangkan menurut majalah Global Finance Bangladesh berada di peringkat 29 negara termiskin di dunia [http://www.gfmag.com/tools/global-database/economic-data/12147-the-poorest-countries-in-the-world.html#axzz2FeIiDMdt] dan tercatat ke dalam 49 besar Least Developed Countries (LDCs) [http://unctad.org/en/docs/ldc2011\_en.pdf] [↑](#footnote-ref-1)
2. Bangladesh merupakan negara dengan populasi yang tinggi (sebanyak 158.570.535 juta penduduk) dan berada di peringkat 4 sebagai negara termiskin di Asia berdasarkan GDP-nya [http://www.worldlistmania.com/top-20-poorest-countries-asia/] [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 Taka = Rp120,- Diakses pada tanggal 28 Desember 2012 [http://www.currency.me.uk/convert/bdt/idr]. [↑](#footnote-ref-3)